
STUDI LITERATUR: KOLABORASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN KESIAPSIAGAAN BENCANA BANJIR DI INDONESIA

Syifa Nurfajrillah^{*1}, Rika Wulan², Resty Milandha³, Kustawan Hidayat⁴, Edi Setiawan⁵
^{1,2,3,4,5} Universitas Sebelas April

Article Info

Article history:

Received April 12, 2026

Revised Mei 20, 2026

Accepted Juni 16, 2026

Keywords:

Collaborative Governance
Manajemen Disaster
Disaster Risk Management
Early Warning System

ABSTRACT

This study aims to examine the collaboration between government and community in improving flood disaster preparedness in Indonesia. The method used is a literature review with a descriptive qualitative approach. Data were collected from ten scientific articles published between 2013 and 2024. The articles were obtained through a structured search on Google Scholar using keywords such as government and community collaboration, flood preparedness, community participation in disaster mitigation, early warning system, and flood risk management. The findings reveal that flood preparedness across different regions in Indonesia remains uneven. Several areas face challenges due to limited knowledge, weak early warning systems, and lack of community involvement in planning. On the other hand, other regions demonstrate stronger synergy between authorities and residents. This study concludes that inclusive, continuous, and trust-based collaboration between government and society is essential in building a resilient and adaptive flood preparedness system.



Copyright © 2026 JRPA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Syifa Nurfajrillah
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas April
Jln. Angkrek Situ No. 19 Sumedang
Email: snurfajrillah@gmail.com

1. INTRODUCTION

Indonesia merupakan negara yang secara geografis terletak di wilayah cincin api Pasifik dan memiliki iklim tropis, sehingga sangat rentan terhadap berbagai bencana alam, salah satunya adalah banjir. Banjir merupakan salah satu bencana yang paling sering terjadi di Indonesia dan hampir menjadi peristiwa tahunan, terutama pada saat musim hujan. Bencana banjir tidak hanya terjadi di wilayah-wilayah dataran rendah atau daerah aliran sungai (DAS), tetapi juga mulai melanda kawasan perkotaan sebagai akibat dari menurunnya daya dukung lingkungan dan buruknya sistem drainase. Dampak yang ditimbulkan pun sangat kompleks, mulai dari kerusakan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum, terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, peningkatan risiko penyakit menular, hingga korban jiwa. Fenomena ini menjadi pertanda bahwa banjir bukan lagi sekadar permasalahan lingkungan biasa, melainkan telah menjadi ancaman multidimensional yang memerlukan penanganan secara serius, terstruktur, dan berkelanjutan.

Permasalahan banjir sejatinya tidak hanya bersumber dari faktor alamiah seperti curah hujan yang tinggi, melainkan juga diperparah oleh faktor antropogenik atau aktivitas manusia. Alih fungsi lahan secara masif tanpa mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, pembangunan permukiman yang tidak memperhatikan aspek konservasi dan tata ruang, serta perilaku membuang sampah ke sungai telah menyebabkan terganggunya sistem aliran air dan berkurangnya area resapan. Bahkan, banyak wilayah yang semula merupakan daerah penyangga atau hutan lindung telah berubah menjadi kawasan industri dan perumahan. Situasi ini menjadikan banjir sebagai ancaman yang semakin sulit dikendalikan jika tidak dilakukan perubahan paradigma dari penanganan berbasis reaktif menjadi penanggulangan yang bersifat preventif dan partisipatif. Dengan kata lain, dibutuhkan pendekatan yang tidak hanya mengandalkan aspek teknis, tetapi juga melibatkan kesadaran kolektif masyarakat serta kebijakan pemerintah yang responsif terhadap permasalahan lingkungan.

Dalam konteks manajemen bencana, tahap pra-bencana menjadi salah satu aspek paling penting yang seringkali diabaikan. Kesiapsiagaan sebagai bagian dari tahapan pra-bencana merupakan langkah proaktif yang bertujuan untuk meminimalkan risiko serta mempercepat proses penanggulangan ketika bencana terjadi. Kesiapsiagaan mencakup berbagai aspek, antara lain edukasi publik, penyusunan rencana kontinjensi, simulasi evakuasi, serta penyediaan infrastruktur penunjang seperti sistem peringatan dini (*early warning system*). Ketika seluruh komponen masyarakat memiliki kesiapsiagaan yang baik, maka dampak bencana dapat ditekan seminimal mungkin. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas dan kesiapan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun masyarakat, menjadi elemen krusial dalam menciptakan sistem mitigasi bencana yang tangguh.

Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam menjamin keselamatan warganya dari ancaman bencana. Dalam konteks kesiapsiagaan menghadapi banjir, peran pemerintah mencakup penyusunan kebijakan kebencanaan, penyediaan anggaran, pembangunan infrastruktur penanggulangan bencana, serta penyelenggaraan pelatihan atau simulasi yang melibatkan aparat daerah dan warga. Selain itu, pemerintah juga perlu mengintegrasikan kebijakan pembangunan wilayah dengan prinsip-prinsip ketahanan bencana, seperti pengelolaan daerah resapan air dan pelestarian daerah aliran sungai. Namun demikian, peran pemerintah tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan model kolaborasi yang sejajar antara pemerintah dan masyarakat, dengan masing-masing pihak saling melengkapi dan mendukung dalam membangun kesiapsiagaan yang berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat dalam program kesiapsiagaan terhadap banjir menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan ketangguhan komunitas. Masyarakat yang memiliki pengetahuan lokal serta pengalaman dalam menghadapi banjir memiliki potensi besar untuk terlibat dalam proses identifikasi risiko, pemetaan wilayah rawan bencana, dan perencanaan langkah-langkah mitigasi. Pelibatan masyarakat juga memberikan efek positif terhadap keberlanjutan program, karena masyarakat tidak lagi hanya berperan sebagai objek penerima bantuan, melainkan sebagai subjek yang aktif dalam merancang dan melaksanakan solusi. Oleh sebab itu, membangun partisipasi yang bermakna merupakan fondasi utama dalam sistem penanggulangan bencana yang berbasis pada kebutuhan lokal dan kesadaran kolektif.

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam konteks kesiapsiagaan terhadap banjir tidak dapat dicapai secara instan. Kolaborasi yang ideal memerlukan proses pembentukan kepercayaan, transparansi informasi, serta komunikasi yang terbuka. Sayangnya, dalam kenyataannya, banyak program kesiapsiagaan yang masih berjalan secara sepihak atau top-down, tanpa melibatkan masyarakat secara maksimal. Hal ini menyebabkan kurangnya rasa memiliki dari masyarakat terhadap program tersebut, yang pada akhirnya berujung pada ketidakefektifan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, perubahan pendekatan dari model komando menjadi model kolaboratif merupakan langkah strategis yang harus segera diambil.

Dalam praktik di berbagai daerah, masih ditemukan keterbatasan pelibatan masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan program kesiapsiagaan. Banyak masyarakat yang belum dilibatkan secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, sehingga partisipasi yang terbentuk hanya bersifat formalitas.

Minimnya keterlibatan ini menyebabkan masyarakat kurang memahami tujuan program dan cenderung pasif dalam pelaksanaannya. Hal ini memperlihatkan bahwa mekanisme partisipatif yang seharusnya menjadi ruh dalam penanggulangan bencana belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kebijakan dan strategi penanganan banjir.

Salah satu tantangan yang turut memperlemah efektivitas kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adalah lemahnya komunikasi dua arah. Pemerintah seringkali tidak menyediakan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk menyampaikan gagasan, kritik, atau kebutuhan lokal terkait kesiapsiagaan bencana. Di sisi lain, masyarakat juga kerap tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai rencana dan pelaksanaan program pemerintah. Akibatnya, terbentuk kesenjangan pemahaman antara kedua pihak yang dapat memicu ketidakpercayaan dan rendahnya partisipasi warga terhadap program-program yang ada.

Selain persoalan komunikasi dan partisipasi, kendala struktural juga kerap menjadi hambatan dalam membangun kesiapsiagaan bencana banjir. Beberapa daerah masih menghadapi keterbatasan dalam hal kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana. Ketidaksinambungan program antarlembaga, tumpang tindih kebijakan, serta minimnya koordinasi lintas sektor juga menjadi faktor penghambat dalam menciptakan sistem kesiapsiagaan yang kuat dan berfungsi optimal. Oleh karena itu, penguatan institusi dan sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kebutuhan mendesak dalam kerangka penanggulangan bencana secara terpadu.

Pengalaman dari beberapa daerah menunjukkan bahwa ketika pemerintah dan masyarakat membangun sinergi yang baik, kesiapsiagaan terhadap banjir dapat ditingkatkan secara signifikan. Melalui pembentukan forum warga, pelatihan berbasis komunitas, serta kegiatan gotong royong dalam perbaikan lingkungan, tercipta ketangguhan lokal yang mampu menghadapi ancaman banjir secara lebih mandiri. Model seperti ini layak dijadikan acuan dalam memperbaiki praktik kolaborasi di daerah lain, dengan catatan bahwa setiap intervensi harus disesuaikan dengan karakteristik lokal.

Dalam kajian akademik maupun praktik kebijakan, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat telah diakui sebagai pendekatan yang paling efektif dalam membangun ketahanan terhadap bencana. Namun demikian, keberhasilan kolaborasi ini sangat tergantung pada keterbukaan informasi, kejelasan peran masing-masing pihak, serta komitmen untuk saling bekerja sama dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, penting untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap praktik kolaborasi yang telah berjalan, guna mengidentifikasi tantangan dan merumuskan strategi perbaikan ke depan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diidentifikasi beberapa indikasi masalah sebagai berikut:

1. Kesiapsiagaan terhadap bencana banjir masih belum optimal, terbukti dari masih tingginya dampak yang ditimbulkan setiap kali banjir terjadi di berbagai daerah.
2. Pelibatan masyarakat dalam program kesiapsiagaan masih bersifat terbatas, belum menyentuh aspek perencanaan secara menyeluruh, sehingga partisipasi yang terbangun belum sepenuhnya aktif dan berkelanjutan.
3. Komunikasi antara pemerintah dan masyarakat belum terjalin secara efektif, yang menyebabkan kesenjangan informasi serta ketidaksesuaian antara program yang dirancang oleh pemerintah dan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.

2. METHOD

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*literature review*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai hasil penelitian sebelumnya yang membahas kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana banjir. Data sekunder diperoleh dari 10 artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam kurun waktu 2013 hingga 2024.

Artikel-artikel tersebut dihimpun melalui penelusuran pada laman Google Scholar, dengan menggunakan kata kunci kolaborasi pemerintah dan masyarakat, kesiapsiagaan bencana banjir, partisipasi masyarakat dalam mitigasi banjir, sistem peringatan dini, dan manajemen risiko banjir di Indonesia. Pemilihan artikel didasarkan pada kesesuaian topik, kejelasan fokus analisis, dan relevansi empiris dengan konteks kesiapsiagaan bencana banjir. Hanya artikel dari jurnal ilmiah nasional yang memiliki fokus pada manajemen bencana, administrasi publik, geografi, dan ilmu pemerintahan yang dimasukkan dalam kajian ini.

Setiap artikel dianalisis melalui pembacaan intensif untuk mengidentifikasi temuan-temuan utama terkait bentuk kolaborasi, efektivitas strategi kesiapsiagaan, tingkat partisipasi masyarakat, serta peran pemerintah daerah. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan dalam bentuk tabel sintesis berisi nama penulis, tahun terbit, nama jurnal, dan ringkasan hasil penelitian. Tabel tersebut menjadi dasar dalam penyusunan sintesis tematik yang disajikan pada bagian pembahasan. Melalui metode ini, kajian diharapkan

dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai praktik kolaborasi pemerintah dan masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul dalam membangun kesiapsiagaan bencana yang inklusif dan berkelanjutan.

3. RESULTS AND DISCUSSION

Hasil penelitian ini didasarkan pada bencana banjir yang terjadi di Indonesia. Peneliti melakukan pengumpulan beberapa artikel ilmiah melalui kanal google scholar kemudian ditemukan 10 jurnal yang relevan dengan topik yang didasarkan pada pengkajian tahun 2013-2024. Pembatasan tahun artikel penelitian tersebut bertujuan agar mendapatkan hasil yang memiliki kebaruan dan dapat dilakukan kajian lebih dalam terhadap topik mengenai kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan bencana banjir. Berikut hasil analisis dari beberapa artikel penelitian terdahulu yang membahas kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan bencana banjir sebagai bahan dasar tinjauan dapat ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 1. Hasil Review Artikel Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesiapsiagaan Bencana Banjir

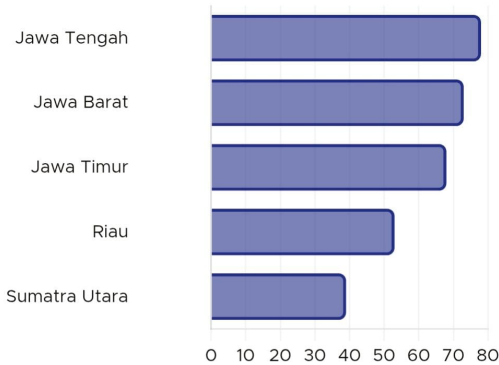
No	Peneliti dan Tahun	Jurnal	Hasil Penelitian
1	(Devy Erlia, Rosalina Kumalawati, Nevy Aristin, 2017)	Jurnal Pendidikan Geografi	Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah di Kecamatan Martapura Barat dalam menghadapi bencana banjir tergolong sedang. Masyarakat telah memiliki kesadaran akan risiko banjir, namun pengetahuan dan keterampilan dalam mitigasi masih terbatas. Pemerintah setempat telah melakukan beberapa langkah seperti penyusunan rencana penanggulangan dan penyediaan sarana dasar, namun implementasinya belum maksimal, terutama dalam hal sosialisasi, pelatihan, dan sistem peringatan dini yang belum berjalan efektif. Koordinasi antara pemerintah dan masyarakat juga masih perlu ditingkatkan agar penanganan bencana dapat berjalan lebih terencana dan terpadu.
2	(Nur Mas Ula, I Putu Siartha, I Putu Ananda Citra, 2019)	Jurnal Pendidikan Geografi Undikhsa	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif korelasional untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana banjir di Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat berada pada kategori sedang dengan persentase 77,14%, sedangkan tingkat kesiapsiagaan juga tergolong sedang sebesar 92,86%. Penelitian ini menemukan adanya hubungan positif antara pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat, meskipun korelasinya lemah. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan dapat berkontribusi terhadap kesiapsiagaan, sehingga diperlukan upaya edukasi dan pelatihan kebencanaan secara berkelanjutan.
3	(Ananto Aji, 2015)	Indonesian Journal of Conservation	Penelitian ini menunjukkan bahwa kesiapsiagaan masyarakat di Desa Welahan dan Desa Ketileng Singolelo, Kecamatan Welahan, masih tergolong rendah, khususnya pada tahap pra-bencana. Masyarakat belum memiliki pengetahuan, pelatihan, dan fasilitas peringatan dini yang memadai. Saat bencana terjadi,

			respons masyarakat meningkat melalui gotong royong dan evakuasi mandiri, meskipun belum terkoordinasi secara formal. Pada tahap pascabencana, pemulihan dilakukan secara swadaya, namun bantuan dari pemerintah masih terbatas. Secara keseluruhan, kesiapsiagaan masyarakat belum optimal dan memerlukan peningkatan melalui pelatihan, penyediaan sarana, serta penguatan kerja sama dengan lembaga terkait.
4	(Agung Hildayanto, 2020)	Journal of Public Health Research and Development	Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan sikap kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana banjir masih tergolong rendah. Dari total 99 responden, hanya 36,4% yang memiliki pengetahuan kesiapsiagaan yang baik, sedangkan 63,6% memiliki pengetahuan yang kurang. Untuk aspek sikap, hanya 46,5% masyarakat yang menunjukkan sikap kesiapsiagaan yang baik, sementara 53,5% lainnya tergolong kurang. Temuan ini mencerminkan bahwa sebagian besar masyarakat belum cukup siap dalam menghadapi risiko banjir, baik dari sisi pemahaman maupun respons. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya pembentukan komunitas siaga bencana di tingkat masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan kesiapan dalam menghadapi bencana banjir secara kolektif.
5.	(Sriyono et al., 2024)	Indonesian Journal of Conservation	Penelitian ini menunjukkan bahwa kesiapsiagaan masyarakat di Kabupaten Demak dalam menghadapi bencana banjir masih bervariasi, tergantung pada wilayah dan akses informasi. Sebagian masyarakat memiliki pemahaman yang baik, namun sebagian lainnya masih kurang teredukasi. Kolaborasi antar unsur pentahelix pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, dan media belum berjalan optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi terpadu untuk meningkatkan sinergi dan kesiapsiagaan masyarakat secara menyeluruh dalam menghadapi banjir.
6	(Agus Taryana et al., 2022)	Jurnal Administrasi Negara	Penelitian ini menunjukkan bahwa kesiapsiagaan masyarakat DKI Jakarta terhadap banjir tergolong cukup baik, terutama dari sisi pengetahuan dan respons terhadap informasi peringatan dini seperti J-FEWS. Edukasi dari pemerintah dan media turut meningkatkan kesadaran masyarakat. Namun, tantangan masih ditemukan pada tahap pascabencana, khususnya dalam hal koordinasi antarinstansi dan pemeliharaan infrastruktur. Oleh karena itu, meskipun kesiapsiagaan sudah berkembang, penguatan kolaborasi dan sistem penanganan jangka panjang masih diperlukan.
7	(Ahmad Fatkul Fikri et al., 2020)	Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data

		Praja	melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Brebes memiliki pengetahuan yang baik mengenai ancaman banjir dan Covid-19, namun belum memiliki rencana kontingensi khusus untuk menghadapi bencana banjir di masa pandemi. Sistem peringatan dini masih bersifat konvensional, dan belum pernah dilakukan simulasi banjir selama pandemi. Meski telah terjalin kerja sama dengan masyarakat, kesiapsiagaan secara umum masih perlu ditingkatkan melalui regulasi, pelatihan relawan, dan koordinasi antarinstitusi.
8	(Nurlailah Umar, 2013)	Jurnal Keperawatan Soedirman	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk menggambarkan pengetahuan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi banjir di Desa Bolapapu, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih belum memahami sepenuhnya tentang bencana banjir dan langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, maupun setelah banjir terjadi. Kurangnya pengetahuan ini menyebabkan kesiapsiagaan masyarakat tergolong rendah. Oleh karena itu, penelitian menyarankan pentingnya pemberian pendidikan dan pelatihan kesiapsiagaan agar masyarakat lebih siap dalam menghadapi risiko bencana banjir.
9	(Abdur Rahim et al., 2023)	Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan	Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Indramayu telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam penanggulangan banjir melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala, seperti kurangnya koordinasi antar instansi, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, serta rendahnya partisipasi aktif masyarakat. Beberapa langkah fisik seperti normalisasi sungai dan pembangunan sistem drainase telah dilakukan, namun belum didukung oleh sistem peringatan dini yang optimal. Selain itu, kesiapsiagaan masyarakat juga masih perlu ditingkatkan melalui edukasi dan pelatihan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kelembagaan dan kolaborasi lintas sektor agar penanggulangan banjir di Indramayu dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
10	(Danny Permana, 2023)	Jurnal Ilmu Sosial	Penelitian ini menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Bandung telah menjalankan peran penting dalam penanggulangan risiko bencana banjir melalui berbagai upaya strategis. BPBD melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan, serta memberikan peringatan dini sebagai langkah antisipatif. Selain itu, BPBD menjalin kerja sama dengan berbagai instansi untuk mendukung pelaksanaan program di lapangan, dan mulai melibatkan kelompok masyarakat

seperti Pramuka dan Taruna Siaga Bencana sebagai mitra dalam penanganan banjir. BPBD juga berfungsi sebagai penghubung dalam mengatasi miskomunikasi antar pihak terkait, guna memastikan koordinasi yang lebih efektif dalam penanggulangan bencana.

Banjir adalah suatu peristiwa tingginya aliran sungai di mana air menggenangi wilayah dataran banjir. Bencana banjir diukur dengan probabilitas terjadinya kerusakan yang secara umum disebut sebagai risiko banjir, atau dampaknya terhadap masyarakat seperti korban jiwa atau kerusakan material masyarakat (Dewi, 2007). Bencana banjir merupakan ancaman bagi penduduk beserta aktivitasnya, dan risiko bencana banjir meningkat di banyak tempat disebabkan oleh intensifnya pembangunan pada wilayah dataran banjir (Sagala et al., 2012; Sakijege, 2013). Pada tahun 2025 ini telah terjadi bencana banjir terbanyak di Indonesia yaitu di Jawa Tengah seperti yang tertera dalam data oleh BNPB sebagai berikut:



Gambar 1. Data Provinsi dengan Jumlah Kejadian Banjir Tertinggi Tahun 2025

Berdasarkan grafik data lima provinsi dengan kejadian banjir terbanyak sepanjang tahun 2025. Terlihat bahwa Provinsi Jawa Tengah menduduki posisi tertinggi dengan jumlah 86 kejadian banjir. Disusul oleh Jawa Barat dengan 82 kejadian, kemudian Jawa Timur sebanyak 58 kejadian, Aceh sebanyak 47 kejadian, dan Sulawesi Selatan sebanyak 31 kejadian. Data tersebut menunjukkan bahwa wilayah Pulau Jawa, khususnya provinsi-provinsi dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi, merupakan daerah yang paling rentan terhadap kejadian banjir.

Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti curah hujan tinggi, alih fungsi lahan yang tidak terkendali, serta buruknya sistem drainase di wilayah perkotaan dan pedesaan. Tingginya angka kejadian banjir di provinsi-provinsi tersebut menjadi sinyal penting perlunya perhatian lebih dari pemerintah daerah maupun pusat dalam upaya mitigasi. Penguatan sistem peringatan dini, normalisasi sungai, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan menjadi langkah-langkah strategis yang harus segera dilakukan.

Indonesia berada di wilayah iklim tropis, yang terdiri dari 81% perairan hangat sehingga membuat suhu di pesisir pantai stabil di angka 28 °C, sedangkan daerah pedalaman dan pegunungan bersuhu 26 °C, dan untuk wilayah pegunungan yang lebih tinggi umumnya mencapai suhu 23 °C. Kondisi iklim tersebut menjadikan wilayah Indonesia sebagian besar basah karena hujan. Akibatnya beberapa daerah di Indonesia mengalami banjir. Menurut laporan BNPB menyatakan bahwa pada 5 tahun terakhir telah terjadi 505 peristiwa banjir pada tahun 2019 dari total 1828 seluruh kejadian bencana (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2019).



Gambar 2. Peta Wilayah Indonesia

Dilihat dari gambar tersebut, tampak jelas bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas, terbentang dari Sabang hingga Merauke, dengan ribuan pulau yang tersebar dan berbagai karakteristik geografis yang berbeda-beda. Kondisi ini menjadikan Indonesia rentan terhadap berbagai jenis bencana alam, terutama banjir yang hampir selalu terjadi setiap tahun, khususnya pada musim penghujan. Bencana banjir tidak hanya menyebabkan kerusakan infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang besar terhadap kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi kesiapsiagaan yang menyeluruh dan terintegrasi, yang tidak hanya mengandalkan peran pemerintah, tetapi juga menempatkan masyarakat sebagai mitra aktif dalam pengurangan risiko bencana.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menyiapkan kerangka kebijakan, membangun sistem peringatan dini, serta menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung mitigasi bencana. Di sisi lain, masyarakat memiliki peran penting dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, seperti mengikuti simulasi evakuasi, pelatihan kebencanaan, serta pemantauan kondisi lingkungan secara mandiri. Kolaborasi antara kedua pihak ini menjadi fondasi penting bagi keberhasilan sistem kesiapsiagaan. Pelibatan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kebijakan memungkinkan respons yang lebih tepat sasaran, sekaligus meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif terhadap upaya penanggulangan bencana (Aprilia et al., 2023).

Dalam pelaksanaannya, efektivitas kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dipengaruhi oleh terbentuknya kepercayaan, kekompakan, serta komunikasi dua arah yang terbuka dan partisipatif. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah mendorong keterlibatan aktif dalam setiap tahapan penanggulangan banjir, terutama ketika pemerintah hadir secara konsisten dalam membina hubungan yang dialogis dan akuntabel. Kolaborasi yang dibangun atas dasar kesetaraan dan saling percaya tersebut telah terbukti mendorong keberhasilan dalam praktik penanganan banjir di kawasan rawan seperti Sungai Ciliwung, Jakarta Timur (Sartika & Astuti, 2023).

Berdasarkan 10 jurnal yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana banjir di berbagai wilayah Indonesia berada pada kategori yang beragam. Beberapa daerah menunjukkan kesiapsiagaan yang rendah karena minimnya pengetahuan, sarana mitigasi, serta sistem peringatan dini yang belum tersedia secara optimal. Di sisi lain, terdapat pula wilayah yang tergolong cukup siap namun masih menghadapi tantangan pada aspek koordinasi dan pelaksanaan di lapangan. Keberagaman ini mencerminkan bahwa kesiapsiagaan tidak hanya bergantung pada faktor geografis dan kerentanan fisik, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh kualitas kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat setempat.

Wilayah yang menunjukkan kesiapsiagaan rendah di antaranya adalah Desa Welahan dan Desa Ketileng Singolelo di Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara. Di wilayah ini, masyarakat belum mendapatkan pelatihan yang memadai, tidak memiliki sistem peringatan dini, dan hanya mengandalkan respons spontan seperti gotong royong saat banjir terjadi. Kasus serupa juga ditemukan di Desa Bolapapu, Kabupaten Sigi, di mana rendahnya pemahaman masyarakat terhadap langkah-langkah penanganan banjir menyebabkan upaya mitigasi tidak berjalan maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketika kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat masih bersifat pasif, kesiapsiagaan cenderung bergantung pada reaksi sesaat, bukan pada sistem yang terencana.

Di sisi lain, daerah seperti DKI Jakarta dan Kabupaten Bandung telah memperlihatkan kesiapsiagaan yang lebih baik. Di Jakarta, masyarakat menunjukkan respons positif terhadap sistem peringatan dini seperti J-FEWS, sementara di Kabupaten Bandung, BPBD menjalin kerja sama aktif dengan komunitas lokal, termasuk Taruna Siaga Bencana dan Pramuka, dalam upaya edukasi dan sosialisasi kebencanaan. Masyarakat di daerah ini lebih siap dalam hal pengetahuan, keterlibatan dalam pelatihan, dan pemanfaatan informasi kebencanaan yang difasilitasi oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa ketika kolaborasi pemerintah dan masyarakat dibangun secara intensif dan partisipatif, kesiapsiagaan cenderung meningkat secara signifikan.

Dengan demikian, kesiapsiagaan bencana banjir bukan hanya ditentukan oleh infrastruktur fisik atau kebijakan formal semata, melainkan sangat bergantung pada kekuatan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah memiliki peran strategis dalam membentuk sistem manajemen bencana yang inklusif, membangun kapasitas kelembagaan, menyediakan sarana pelatihan, serta memastikan bahwa informasi kebencanaan tersampaikan secara merata dan tepat sasaran. Di sisi lain, masyarakat perlu didorong untuk menjadi subjek aktif dalam pengelolaan risiko bencana, bukan sekadar objek penerima bantuan. Peningkatan kesiapsiagaan menuntut keterlibatan dua arah pemerintah yang proaktif dan masyarakat yang partisipatif. Upaya ini perlu dibarengi dengan integrasi lintas sektor, pelibatan komunitas lokal, serta penanaman nilai budaya sadar bencana sejak dini melalui pendidikan dan media. Hanya dengan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan, kesiapsiagaan masyarakat Indonesia terhadap bencana banjir dapat tumbuh menjadi sistem yang tangguh dan adaptif di tengah ancaman perubahan iklim dan dinamika lingkungan yang terus berkembang.

4. CONCLUSION

Kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir masih menjadi tantangan di berbagai daerah di Indonesia. Beberapa wilayah sudah menunjukkan kesiapan yang cukup baik karena adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat yang berjalan secara aktif dan terarah. Namun, tidak sedikit daerah yang belum siap, terutama karena kurangnya pelatihan, minimnya akses terhadap informasi kebencanaan, serta belum adanya sistem peringatan dini yang memadai. Pemerintah seharusnya tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga hadir secara nyata di tengah masyarakat untuk memberikan pendampingan dan membangun kapasitas bersama. Sementara itu, masyarakat perlu dilibatkan sejak awal agar memiliki pemahaman dan peran yang jelas dalam setiap tahap penanggulangan bencana. Kolaborasi yang terjalin secara terbuka, saling percaya, dan berkelanjutan dapat mendorong tumbuhnya kesiapsiagaan yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi menjadi bagian dari kehidupan bersama dalam menghadapi risiko banjir.

REFERENCES

- Aji, A. (2015). Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Banjir Bandang Di Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara. *Indonesian Journal of Conservation*, 1-8.
- Aprilia, L., Surya, M. A., & Permatasari, N. (2023). Kolaborasi dalam manajemen risiko bencana di tingkat lokal. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 19-28.
- BNBP. (2019). *Data Informasi Bencana Indonesia Badan Penanggulangan Bencana Indonesia*.
- Dewi, A. (2007). Community Based Analysis of Coping Mechanism on Flood Risk in Urban Areas.
- Erlia, D., Kumalawati, R., & Aristin, N. F. (2017). Analisis Kesiapsiagaan Masyarakat Dan Pemerintah Menghadapi Bencana Banjir Di Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar. *Jurnal Pendidikan Geografi*, 15-24.
- Fikri, A. F., Maarif, S., Widana, I. K., & Tyas, T. H. (2020). Kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten Brebes Dalam Menghadapi Bencana Banjir Di masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 335-342.
- Hidayanto, A. (2020). Pengetahuan dan Sikap Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana Banjir. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 577-586.
- Permana, D. (2023). Peran pemerintah daerah dalam menanggulangi risiko bencana banjir di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmu Sosial*, 156-165.
- Rahim, A., Rifa, A., Soleha, A., Fauziah, H. J., & Syain, M. (2023). Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Banjir Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 3 Tahun 2016. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2160-2163.
- Sagala, S., Lestari, D., & Wulandari, Y. (2012). Kajian Risiko dan Ketangguhan Bencana Banjir di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kebencanaan*, 22-35.
- Sakije, T. (2013). Flooding and Vulnerability of Urban Communities in Dar es Salaam, Tanzania: The Case of Keko Machungwa. *Journal of Environmental Planning and Management*, 241-257.

-
- Sartika, N. R., & Astuti, P. W. (2023). Kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan banjir sungai ciliwung. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 87-95.
- Sriyono. (2024). Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Banjir Di Kabupaten Demak. *Indonesian Journal of Conservation*, 42-49.
- Taryana, A., Mahmudi, M. R., & Bkti, H. (2022). Analisis Kesiapsiagaan Bencana Banjir Di Jakarta. *Jurnal Administrasi Negara*, 302-311.
- Ula, N. M., Siartha, I. P., & Citra, I. P. (2019). Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana Banjir Di Desa Pancasari Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng. *Jurnal Pendidikan Geografi Undikhsa*, 103-112.
- Umar, N. (2013). Pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana banjir di bolapapu kecamatan kulawi sigi sulawesi tengah. *Jurnal Keperawatan Soedirman*, 105-119.